

Resensi Buku:

Judul: **Komunikasi Politik, Media dan Demokrasi**

Penulis: Henry Subiakto dan Rachmah Ida

Penerbit: Kencana, Jakarta (Prenada Media Group)

Edisi Pertama: Sept. 2012

Hal.: 242

Oleh: Yusuf Amrozi, M.MT

Prodi Ilmu Komunikasi IAIN Sunan Ampel



Kehadiran Buku Komunikasi Politik, Media dan Demokrasi memberi ruang diskursus alternatif pada kajian komunikasi politik, pemanfaatan media serta kaitannya dalam praktik demokrasi khususnya di Indonesia. Momentum transisi demokrasi di Indonesia pasca jatuhnya rezim Soeharto dan lahirnya gerakan reformasi memunculkan tatanan baru dalam sistem politik dan sosial budaya di Indonesia. Dalam kaitan dengan itu sistem dan praktik demokrasi berubah seiring dengan perubahan sistem politik nasional. Anasir-anasir global termasuk fenomena teknologi informasi dan komunikasi mutakhir melengkapi instrumen yang diantaranya adalah media komunikasi dalam wajah sistem demokrasi di Indonesia.

Sebagai lazimnya buku kajian, dalam ranah komunikasi politik, didalamnya tidak luput mengulas teori dan konsep komunikasi politik, sejarah kemunculan komunikasi politik di kancah dunia serta komunikasi politik –sebagai kembangan disiplin ilmu komunikasi– dalam ranah ilmu pengetahuan. Buku ini juga membahas teknik atau praktik komunikasi politik beserta isue yang berkaitan dengan media dan politik. Dengan demikian diharapkan pembaca dapat mengembangkan penalaran dan analisis kritis tentang sistem politik. Buku ini juga hendak menawarkan kepada pembaca tentang isue dan fenomena komunikasi politik yang secara intens muncul menghiasi media cetak, elektronik maupun media online dewasa ini. Dengan demikian secara bertahap pembaca diajak memahami bagaimana proses komunikasi politik baik melalui komunikasi formal seperti kampanye pemilu, propaganda maupun retorika politik.

Setidaknya ada 16 bab dalam buku karya Henry Subiakto dan Rachmah Ida ini, yang dimulai dengan pembahasan tentang Komunikasi Politik sebagai Bidang Studi Baru, dilanjutkan mengenai komunikator politik dan kepemimpinan politik serta pesan dalam komunikasi politik. Buku ini juga membahas bagaimana sosialisasi politik dan partisipasi politik, kualitas informasi dan kaitannya dengan demokrasi. Pada Bab 6 sampai bab 11 lebih banyak mengulas tentang Pers, kebebasan pers bagi demokrasi dan kekuasaan Media. Tidak lupa buku ini mengulas komunikasi politik dan pentingnya kesetaraan gender bagi perempuan, etika media massa dan jurnalisme perang. Wal akhir buku ini ditutup

dengan pembahasan mengenai sistem informasi di berbagai negara dan peran humas pemerintah di era demokrasi (Bab 16).

Menurut penulis, komunikasi politik merupakan bidang studi baru dalam komunikasi. Kajian ini baru diterima setelah tahun 1970an. Istilah itu sendiri dibuat pertama kali oleh Euleau, Eldersveld dan Janowitz pada tahun 1956. Euleau dan kawan-kawan mendudukan komunikasi politik sebagai satu dari tiga proses yang berpengaruh dalam kegiatan politik. Dua yang lainnya adalah kepemimpinan politik dan struktur kelompok. Akan tetapi kajian tentang arti pentingnya komunikasi politik sebenarnya lebih jauh dari itu, misalnya saat Aristoteles menyampaikan konsep tentang Retorika atau Niccolo Machiavelli dengan *Il Principe* (sang penguasa) yang didalamnya membawa cara-cara persuasi dalam berpolitik.

Sebagai disiplin baru, komunikasi politik tentu mempunyai bidang-bidang kajian. Bidang itu diantaranya adalah: studi mengenai retorika, analisis propaganda, studi tentang perubahan sikap, studi tentang pendapat publik, studi tentang perilaku pemilih, hubungan pemerintah dengan media serta berbagai teknik dan pendekatan dalam kampanye. Pada perkembangannya kemudian beberapa studi tersebut menyatu dalam kajian komunikasi politik *include* dengan teori-teori kontemporer beserta analisis yang komprehensif. Komunikasi politik banyak meminjam disiplin ilmu lain dalam hal teori maupun metodologi, taruhlah disiplin ilmu antropologi, sosiologi maupun linguistik, termasuk kajian tentang semiotik atau analisis wacana hingga *cultural studies*. Psikologi atau psikologi sosial juga digunakan untuk memahami aspek komunikasi dari sisi individu maupun kelompok tentang perubahan sikap dan perilaku. Karena menurut Dan Nimmo dan Keith Sanders dalam *Hand Book of Political Communication* bahwa pokok bahasan yang paling penting dalam konteks ini adalah komunikasi persuasi, yaitu usaha manusia untuk mempengaruhi orang lain agar sesuai dengan kehendaknya.

Sudah disebutkan diatas, disiplin komunikasi politik bersinggungan dengan berbagai disiplin ilmu lain yang terkait, maka dalam konteks pendekatan kajian model analisis yang dapat dipakai menurut Nimmo adalah; studi agregat, studi kritis, content analysis, studi eksperimental, studi ex post facto dan studi survey. Studi agregat adalah studi yang mendasarkan pada data-data agregat yang menyangkut karakter sasaran penelitian atau hal lain yang tersebar pada daerah atau kawasan yang diambil agregatnya, misalnya dalam konteks membandingkan karakter pemilih masyarakat di perkotaan dan pedesaan. Studi agregat merupakan metode paling kuno dalam pendekatan komunikasi politik. Sedangkan studi kritis adalah metode yang biasa digunakan untuk memahami ideologi yang mendasari suatu sistem komunikasi. Studi kritis atau *cultural criticism* mempunyai konsep bahwa kebudayaan mempunyai kaitan erat dengan kegiatan sosial. Aliran kritis hendak membongkar realitas semu yang dikonstruksi melalui media berdasar ideologi yang digunakan. Studi Analisis Isi atau *content analysis* digunakan untuk meneliti atau menganalisis suatu isi komunikasi dalam kurun waktu dan ruang tertentu dengan maksud untuk mengetahui kecenderungan pesan yang disampaikan baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Model ini dapat digunakan untuk meneliti pesan yang disampaikan

melalui pidato, dokumen tertulis, foto, surat kabar, acara televisi maupun yang disampaikan media massa lainnya.

Sedangkan studi eksperimental adalah model untuk mengetahui hubungan sebab akibat dengan membandingkan antara kelompok eksperimen yang diterpa variabel dan kelompok kontrol yang tidak mendapat terpaan variable yang ditentukan, misalnya penelitian kampanye politik terhadap perilaku pemilih. Studi ex post facto adalah studi eksperimental yang menghadapkan pengandaian jika X demikian maka Y bagaimana. Contohnya misalnya untuk mengetahui latar belakan pergesaran suara pemilu di daerah tertentu maka studi ini mengamati faktor yang terjadi sebelumnya. Studi survey biasa digunakan untuk meneliti populasi yang relatif luas dengan cara menentukan sampel yang merepresentasikan populasi. Metode ini sangat terkenal dewasa ini untuk mengetahui opini publik dan suara pemilih di suatu kawasan atau yang di kenal dengan *polling* atau *quickcount*.

Penulis juga mengartikulasikan makna atau definisi tentang Komunikasi Politik. Mengutip Lord Windlesham (1973): *“Political communication is the deliberate passing of political message by sender to a reciever with intention of making the reciever behave in a way that might not other wise done”*. Jadi komunikasi politik sangat ditentukan tujuan utama yaitu agar penerima berperilaku tertentu, atau yang dimaksud sebagai konsekuensi pada sistem politik. Konsekuensi politik dikemukakan oleh Richard Fagen (1966): *“communicatory activity considered political by virtue of its consequences actual and potential that it has for the functioning of political system”*. Konsekuensi politik inilah yang merupakan unsur potensial yang membedakan komunikasi politik dengan komunikasi sosial. Masih banyak ilmuwan yang mendefinisikan komunikasi politik, yang pasti komunikasi politik dapat diartikan sebagai suatu aktivitas komunikasi yang mempunyai konsekuensi atau akibat politik, aktual potensial terhadap fungsi sistem politik.

Dalam komunikasi setidaknya ada dua elemen penting yaitu; komunikator politik dan kepemimpinan politik. Pada dasarnya setiap orang dapat menjadi komunikator (penyampai pesan) politik, hanya saja bobotnya yang berbeda antara individu satu dengan yang lainnya. Dalam konteks ini kemudian dapat dibagi dalam kategori sebagai politikus, komunikator profesional atau sekedar aktifis partisan. Kelompok kedua yang dimaksud disini bisa jadi seorang promotor atau seorang jurnalis. Peran komunikator dalam komunikasi politik berperan sangat penting untuk mewujudkan komunikasi politik secara efektif. Maka dalam kaitan ini pemimpin atau elit politik “membayar” orang sebagai spokes person atau juru bicara yang mana bertanggungjawab untuk menyampaikan informasi yang responnya menguntungkan. Lebih dari itu dalam praktik politik, misalnya pemimpin negara. Mereka mempunyai asisten ahli tentang “PR”, yang disebut political spin atau spin doctor. Kemampuan atau kelihaihan dalam menyampaikan informasi ke publik, mengelola opini bahkan memutarbalikkan fakta adalah kemampuan yang wajib dimiliki oleh profesi ini. Seperti halnya Presiden Bill Clinton mempunyai *“spinemeister extraodinaire”* Mike McCurry atau eranya Perdana Menteri Tony Blair mempunyai *press secretary* Peter Mendelson.

Tetapi sebaik apapun barisan spokesperson yang ada kalau figur pemimpin politik kadar kualitasnya buruk tentu komunikasi politik yang dijalin tidak akan efektif. Disinilah letak pentingnya kemampuan kepemimpinan politik. Pertanyaannya adalah bagaimana pemimpin yang baik itu, atau bagaimana kepemimpinan yang efektif itu. Pemimpin bisa baik, tetapi pola kepemimpinannya belum tentu efektif atau bisa sebaliknya kepemimpinannya efektif tetapi 'keburukan' nya dapat tertutupi dengan melakukan komunikasi politik yang efektif. Berbicara dalam konteks ini nampaknya dapat berkaca pada pengalaman rezim orde baru mengelola Republik Indonesia. Mending Presiden Soeharto, seorang militer yang sebenarnya mempunyai kemampuan dan pengalaman yang pas-pasan, tetapi dia dapat merekrut dan membentuk barisan tim di sekitarnya sebagai think-tank baik urusan perencanaan pembangunan, strategi pembangunan dan yang lebih penting adalah bagaimana ia dan timnya menyusun sistem politik yang menjadi iklim berbangsa dan bernegara saat itu. Dengan cara itu dengan di tunjang pola komunikasi top down serta arus informasi publik yang sangat terkontrol, maka hampir dua dasawarsa kepemimpinannya begitu efektif, meskipun belakangan publik menilai manajemen otoritatif yang dia gunakan.

Buku ini juga menjelaskan tentang bagaimana komunikasi politik yang dilakukan tidak hanya secara non verbal, yang multi tafsir itu tetapi komunikasi verbal lebih disarankan seperti halnya melakukan edukasi dalam berpolitik. Namun demikian, komunikasi politik yang dilakukan oleh seorang pejabat publik melalui konferensi pers tentu tidak semuanya di tulis oleh wartawan secara lengkap. Biasanya pers akan mengutip sepeinggal kalimat atau sequel adegan mengenai statement apa yang dia sampaikan yang itu dianggap menarik oleh media. Di kalangan jurnalis disebut dengan *Soundbite*. *Sound bite* adalah satu garis kalimat yang diambil dari pidato atau pernyataan panjang atau dari seperangkat teks yang dapat digunakan sebagai indikasi dari pesan yang lebih besar. *Soundbite* digunakan oleh para jurnalis televisi dan reporter radio, mereka menyebutnya sebagai *klip* atau pemenggalan pernyataan yang dianggap penting.

Dalam konteks ini, para politisi –dengan pengalamannya-- biasanya pandai memainkan bahasa *hyperbola* yang mengandung multitafsir, atau ungkapan yang sebaliknya. Dengan khas diplomatis seperti ini mereka secara sadar memakai ungkapan melalui signal nonverbal. Tentu dalam politik ungkapan diplomatis sah dilakukan tetapi komunikasi verbal juga penting untuk dilakukan dalam menyampaikan fakta dan informasi yang sebenarnya, sehingga upaya-upaya edukasi dan diseminasi informasi penting untuk disampaikan kepada publik. Di satu sisi peran media sebagai kanal penyampai pesan sangat strategis untuk mengkonstruksi informasi dan opini yang berkembang. Seringkali media lebih memilih *soundbite* yang kadang kadang bukan informasi yang selayaknya di *blow up*, karena data substansi yang disampaikan adalah sesuatu yang datar dan kurang menarik. Sehingga media acapkali memberitakan informasi yang tidak substantif. Oleh karena itu media sebenarnya juga harus menyampaikan edukasi dan informasi penting dan berimbang.

Proses edukasi politik dapat dilakukan salah satunya melalui sosialisasi politik. Menurut Doris Graber, Sosialisasi politik sebagai proses ketika orang mempelajari struktur dan faktor lingkungan sekaligus mempelajari dan menginternalisasikan aturan dan perilaku mengenai kehidupan berpolitik. Jadi sosialisasi mempengaruhi kualitas interaksi antara masyarakat dan pemerintahnya. Secara lebih luas, buku ini mengutip pendapatnya Soetandyo Wignyosoebroto tentang sosialisasi politik, yaitu bagaimana proses individu dalam masyarakat belajar mengetahui dan memahami tingkah pekerti apa yang harus dilakukan di dalam tatanan masyarakat. Sosialisasi atau pendidikan politik ini dapat dilakukan saat masa anak-anak misalnya melalui keluarga atau di sekolah. Sosialisasi politik saat dewasa dapat dilakukan oleh instrumen-instrumen politik yang berlaku di negara itu seperti partai politik lembaga/badan negara yang terkait, tokoh-tokoh serta mass media.

Dengan adanya sosialisasi politik diharapkan ada kesadaran politik. Warga negara diharapkan mempunyai kesadaran tentang peran, hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara dalam politik. Dengan kesadaran itu akan memungkinkan terjadinya partisipasi politik warga negara. Seringkali karena sistem politik tidak dimungkinkan adanya edukasi politik dan kurang demokratis, maka kesadaran dan partisipasi politik warga negara menjadi kurang. Rakyat mengalami apatisisme dalam politik, rakyat hanya diam, rakyat hanya pasrah apapun yang menjadi kehendak dan kemauan penguasa walaupun hasilnya pahit untuk mereka. Dalam tatanan sistem politik modern yang menerapkan praktik kenegaraan yang demokratis, bentuk partisipasi politiknya melalui kanal akses yang tersedia dan mekanisme resmi, misalnya melalui pemilu yang jujur. Pemilih dapat menyuarakan sesuai hati nuraninya dan menyampaikan pada parpol atau wakil rakyatnya, atau secara langsung melakukan protes dan unjuk rasa. Dengan demikian ada peran rakyat dalam pelibatan pengambilan keputusan-keputusan politik yang berakibat pada nasib warga negara.

Dengan informasi yang disampaikan melalui sosialisasi yang benar maka akan ada 'kebebasan' informasi yang cukup. Salah satu prasyarat terwujudnya iklim demokratis di suatu negara adalah sejauhmana arus informasi bisa berjalan secara lancar, artinya penguasa tidak terlalu ketat mengontrol bahkan menyensor informasi publik. Sampai saat ini di Indonesia sudah ada undang undang yang mengatur itu. Selain revisi undang undang tentang Pers, juga sudah ada undang-undang informasi dan transaksi elektronik dan undang undang keterbukaan informasi publik (KIP). Dalam undang undang KIP pejabat publik wajib memberikan informasi yang sifatnya untuk publik, pejabat tidak boleh dengan sadar menghambat atau menghalangi atau tidak memberikan informasi yg bersifat publik tersebut kepada media atau perseorangan baik diminta atau tidak. Hari ini nampaknya Indonesia sudah pada tataran transparansi informasi publik dan oleh karena itu wajah demokrasi kita sudah terasa beda, pasca rezim orde baru berkuasa. Jadi kebebasan informasi menjadi salah satu syarat terwujudnya demokratisasi.

Berkaca pada pengalaman masa lalu, Pers di Indonesia pernah mengalami pasang surut. Saat Indonesia baru merdeka di masa kepemimpinan Bung Karno, keberadaan media saat itu masih terbatas. Yang ada adalah beberapa surat kabar yang dikelola oleh

para pribumi atau aktivis pemuda / tokoh kemerdekaan, dengan demikian kontennya saat itu sebagai sosialisasi kemerdekaan, bangsa yang berdaulat serta nasionalisme dan lainnya. Media radio dan televisi masih rintisan yang kemudian menjadi cikal bakal TVRI dan RRI. Peran Radio saat itu sangat penting dan menjadi media favorit warga negara. Di Era Demokrasi Liberal tahun 1950an, keberadaan Media cetak kemudian bergeser menjadi media propaganda kekuatan politik. Partai-partai politik mempunyai “corong” untuk mensosialisasikan dan sekaligus mempengaruhi opini warga dalam menggalang dukungan politiknya.

Pada masa Orde Baru ketika sistem politik berubah --dari liberal kemudian dipimpin--menjadi sistem yang dirancang “efektif dan efisien”, maka konsekuensinya adanya pengaturan dan pengontrolan ruang gerak pers. Keberadaan Departemen Penerangan sebagai lembaga pengontrol media punya andil yang besar. Adanya mekanisme sensor, ancaman surat pemberhentian penerbitan (SIUPP/surat ijin usaha penerbitan dan Percetakan) menjadi momok yang menakutkan bagi Pers. Terhitung setidaknya sudah ada beberapa media yang di bredel antara lain Tempo, Detik dan tokohnya/pimrednya masuk penjara tanpa ada alasan hukum yang jelas. Sehingga arus informasi saat itu berlaku top down, sentralistik dan terkendali pada *spokesperson* seperti Menteri Penerangan yang punya wewenang untuk statement di media. Organisasi Pers Nasional tidak lagi independen. Oleh karena itu, yang terjadi adalah Pers bukan sebagai media komunikasi publik, tetapi lebih sebagai corong kekuasaan, atau alat penguasa untuk melanggengkan tiraninya.

Berakhirnya Rezim Orde Baru pada 1998, tampaknya menandai sistem politik yang ada. Angin reformasi tersebut membawa dampak di segala lini kehidupan termasuk sistem pers nasional. Langkah maju tersebut ditandai dengan diberlakukannya Undang undang Pers terbaru no. 40 tahun 1999 yang mana peranan pers sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial. Disamping itu juga bisa berfungsi sebagai lembaga ekonomi agar keberadaan usaha pers tersebut bisa berjalan secara sehat. Singkat kata iklim reformasi menandai kebebasan informasi dan kebebasan pers. Arus informasi menjadi tersebar dan tidak munrni terkendali oleh pemerintah. Seorang pejabat dapat menjadi “bulan-bulanan” media massa karena salah statement atau mengeluarkan statement yang dipandang layak untuk di eksploitasi. Alih-alih yang terjadi kemudian adanya fenomena baru, yaitu fenomena industrialisasi pers yang sangat dominan. Artinya Pers kemudian bukan menjadi tangan kekuasaan tetapi berganti menjadi tangan pemilik modal. Terlebih lagi belakangan muncul fenomena baru pemilik modal pada industri pers juga berpraktisi sebagai politisi.

Oleh karena itu menurut Henry Subiakto dan Rachmah Ida dalam buku ini perlunya pembatasan terhadap pers bebas. Pers sebagai sarana komunikasi politik antara negara dan warga negara harus dapat berjalan secara sehat, di satu sisi bukan menjadi alat kepentingan penguasa di sisi lain bukan menjadi kepentingan semata dari pemilik modal yang akhirnya menjadi kapitalisasi media. Karena itu perlunya regulasi yang tepat sangat diperlukan, misalnya ketentuan dalam peraturan pers berapa persen maksimal seorang

pemilik modal bisa menguasai perusahaan pers tersebut, atau mekanisme tentang periklanan. Sikap dan perilaku berjurnalisme yang sehat dan profesional perlu ditumbuhkembangkan khususnya pada kalangan jurnalis. Bagaimana etika jurnalistik dapat ditegakkan. Wartawan tidak sekedar menyebarkan “kabar bohong” atau gosip yang belum terverifikasi kebenarannya. Profesi wartawan harus menjadi pionir dalam mewujudkan idealisme dan profesionalitas dalam berkarya.

Sudah dijelaskan sebelumnya media memiliki peran yang sangat dominan, media penyiaran tidak saja dipandang sebagai kekuatan civil society tetapi juga menjadi kekuatan kapitalis bahkan pemiliknya terjun dalam politik praktis. Dengan demikian, kekuatan media dapat mengkooptasi bahkan menghegemoni negara dan juga masyarakat. Hal ini sebenarnya yang perlu dikritisi oleh para pendukung demokrasi termasuk dari kalangan jurnalis sendiri. Jangan sampai kekuatan demokrasi dibelokkan atas nama kebebasan pers untuk kepentingan para penguasa dan pengusaha media. Di dalam UU 32/2002 tentang Penyiaran pasal 36 ayat 4 disebutkan; *Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan.* Kemudian berdasarkan peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No. 9/2004 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standart Program Siar pasal 5 ayat e berbunyi; *Lembaga penyiaran menjunjung tinggi prinsip ketidakberpihakan dan keakuratan. Lebih lanjut, lembaga penyiaran harus menyajikan informasi dalam program faktual dengan senantiasa mengindahkan prinsip akurasi, keadilan dan ketidakberpihakan (imparsialitas).*

Pertanyaannya kemudian bagaimana realitasnya? Bagaimana peran pers dalam mengawal penguatan demokrasi. Ada yang mengatakan pilar ke empat demokrasi adalah media massa atau pers, selain legeslatif, eksekutif dan yudikatif. Sebenarnya kebebasan pers bermaksud agar kualitas demokrasi dapat meningkat dengan menjadikan media sebagai kanal akses untuk komunikasi antara negara dan warganegara. Semenjak reformasi, fenomena ini direspon secara beragam. Pertama, ada yang menyambutnya dengan semangat kebebasan. Kedua, ada yang meresponnya dengan situasi yang biasa saja karena konsekuensi dari transisi sosial politik. Ketiga, ada yang khawatir dampak negatif dari kebebasan pers itu sendiri. Apapun yang terjadi faktanya saat ini di Indonesia terjadi liberalisasi media. Sedikit banyak media tidak dapat independen seratus persen apakah dari aspek politik atau kepentingan ekonomi karena sebagian pemiliknya terlibat dalam politik praktis dan industri pers. Di era transisi saat ini, industri pers menjadi sesuatu yang menjanjikan dan terbukti menguntungkan secara ekonomi.

Jika dikembalikan, hakekat utama dari peran jurnalistik adalah mencari, mengumpulkan, mengolah dan menyampaikan berita atau fakta. Dalam kaitan dengan sikap profesionalitas dan loyalisme seharusnya pers lebih mendahulukan kepentingan bangsa dan negara atau lebih tepatnya menegakkan nasionalisme. Oleh karena itu jiwa nasionalisme juga harus terpatri pada semua kalangan pelaku jurnalis. Memang pemilik dan pengelola media harus memberi contoh yang baik dan tidak itu saja secara kesejahteraan mereka harus dapat memberi penghasilan yang layak agar profesionalitas dan integritas dalam menegakkan etika profesi jurnalistik dapat dijalankan dengan benar.

Tantangan yang juga diperhatikan adalah bagaimana mengelola usaha media secara sehat dan bermartabat. Dengan demikian pers dapat kembali pada posisi awal sebagai pengawal demokrasi dan kontrol kekuasaan.

Namun alih alih sebagai sarana informatif dan edukatif, media juga memerankan sebagai sarana komunikasi budaya. Dengan adanya fenomena "*global village*" seperti saat ini, budaya dan peradaban lain dapat secara berkembang dan di ikuti di berbagai kawasan dengan cepat dan mudah. Orang kemudian menyebutnya sebagai budaya populer (budaya pop). Budaya pop dewasa ini banyak dihasilkan atau dibentuk oleh media. Budaya pop yang dikonstruksi oleh media disebut sebagai budaya massa. Budaya massa memang cepat sekali pertumbuhannya dan akan silih berganti. Artinya, timbul dan tenggelamnya membutuhkan waktu yang relatif cepat. Orang kemudian menyebutnya sebagai budaya instant. Pertanyaannya apakah ada kaitan antara konteks politik atau komunikasi politik dan budaya pop tersebut. Yang pasti bahwa media saat ini didukung atau tergantung dengan kemajuan teknologi informasi yang berjalan. Dalam konteks komunikasi politik, saat ini trend misalnya tele-polling, paket sms gateway, exitpoll dan semacamnya adalah implementasi dari budaya pop yang digunakan sebagai sarana komunikasi politik. Artinya dengan pemanfaatan teknologi tersebut misi politik akan sangat terbantu efektivitasnya.

Buku ini juga mengulas komunikasi politik dan gender. Politik oleh sebagian kalangan dipahami identik dengan laki-laki. Mitos yang berkembang, perempuan tidak boleh bermain dan berkiperah di ranah politik. Akibatnya semakin sulit perempuan untuk mendudukkan hak-haknya setara sebagai warga negara dengan laki-laki. Pandangan yang *stereotype* ini tentu tidak menguntungkan eksistensi kaum perempuan. Pada era 1992-1997 di Indonesia jumlah anggota DPR dari perempuan sejumlah 12,3 persen (63 orang). Tahun 1997-1999 turun menjadi 11,5 persen (57 orang) dan pada 1999-2004 turun lagi menjadi sekitar 9 persen (45 orang). Baru setelah itu muncul kesadaran dan titik balik tentang harusnya akses politik perempuan harus ada kesetaraan. Kemudian muncul keinginan quota perempuan di parlemen sediditnya 30 persen. Bahkan peraturan terbaru angka 30 persen tersebut harus muncul di kelipatan nomor urut caleg. Jadi misalnya antara nomor urut 1 sampai 3, minimal harus ada unsur satu dari perempuan untuk pemilu 2014 yang akan datang. Jadi perempuan tidak hanya menjadi komoditas politik saja tetapi juga menjadi aktor politik dalam memperjuangkan kepentingannya dan media juga harus terus "meliput" diskursus perempuan dalam politik.

Buku ini juga menyoroti peran pemberitaan media tentang Pilkada di daerah. Karena sebenarnya proses demokrasi rakyat secara lebih intens di daerah. Bagaimana rakyat dapat terlibat secara lebih massif dan intens di daerah. Persoalan yang terjadi lagi-lagi media masih belum sepenuhnya memerankan misinya. Media masih dominan sebagai lembaga ekonomi, dan kurang memerankan fungsi edukasi, selain fungsi informasi dan hiburan. Misalnya saja, masih belum banyak media yang memblow up fenomena politik uang dan mengangkat issue itu sampai ranah hukum dan menjadikan presedent yang tidak baik ini menjadi shok terapi para pelakunya. Idealnya memang wartawan mengetahui betul seluk-beluk peraturan pilkada sehingga dapat memberitakan atau memblow-up

kasus atau peristiwa yang itu adalah bentuk-bentuk kecurangan dalam pilkada. Andaikan dari mereka mengetahui terkadang juga butuh keberanian untuk memberitakannya. Tidak sedikit memang kasus-kasus itu yang karena memberitakan berimbas pada adanya korban pelaku jurnalis dalam bentuk intimidasi, teror hingga penghilangan nyawa.

Kegiatan jurnalistik sebenarnya bukanlah profesi yang bebas resiko, tidak saja tuntutan pemenuhan etika profesi dan penegakan profesionalitas tetapi resiko yang harus dihadapi termasuk menjadi korban penindasan dan kematian. Konstelasi politik global meniscayakan adanya perang terbuka atau sekedar perang urat syaraf antar negara atau gabungan/blok antar kawasan. Pasca perang dunia dilanjutkan perang dingin, kemudian perang-perang di berbagai titik zona di dunia hingga saat ini proyek besar negara barat dalam perang melawan terorisme global. Kegiatan jurnalistik perang atau jurnalisme konflik tentu memiliki keunikan sendiri tantangan dan resiko yang dihadapi. Dengan produk fotografi atau deskripsi visual/audio visual yang lain publik dunia dapat “digiring” untuk misalnya bahwa perang dengan segala konsekuensinya perlu diakhiri dan perlunya tatanan dunia yang damai. Atau dalam konteks lain, terorisme menjadi sesuatu yang menjadi musuh bersama dan karena itu harus diperangi berdasarkan dampak sosial atau korban yang ada. Tetapi ada hal yang tidak boleh dilupakan, media mempunyai misi berdasarkan politik media yang sedang berkuasa saat itu. Misalnya dengan teori agenda setting, media dapat lebih memilih dan memblow-up secara intens atas kasus atau peristiwa tertentu sehingga menjadi fokus perhatian publik. Oleh karena itu, media memang “tidak” bebas nilai.

Saat ini pada era kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, peran negara dalam melakukan komunikasi politik baik dalam negeri maupun luar negeri sangat terbantu atas dukungan teknologi (internet) tersebut. Masing-masing departemen di pemerintahan mempunyai portal-portal layanan informasi publik yang di berbagai tempat sudah terhubung secara integrasi. Penggunaan media internet untuk perdagangan barang saja meningkat, data tahun 1973 ke tahun 1995 angkanya melonjak dari 6,6 % menjadi 24,7 %. Itu artinya percepatan perputaran informasi akan mendukung dan melapangkan area bisnis dan pernik-pernik transaksinya. Masalahnya adalah perputaran informasi yang sangat cepat, banyaknya khalayak pengakses dan yang berkepentingan akan menentukan sejauhmana validitas dan kualitas informasi yang beredar. Celaknya kalau informasi yang beredar itu bukan fakta tetapi gosip atau rumor. Rumor dalam konteks ini adalah informasi yang sudah mendapat penafsiran atau opini yang karenanya sudah bias dari fakta aslinya atau memang sengaja dibiarkan oleh pihak yang berkepentingan. Misalnya saja pada pasar saham, ketika beredar informasi Sir Alex Ferguson mundur dari jabatan pelatih club sepak bola Manchester United (MU) awal Mei 2013 langsung saja saham MU anjlok hingga 5%.

Oleh karena itu pentingnya kualitas data dan informasi beberapa negara maju mempunyai sistem informasi pelayanan publik. Ada yang membentuk badan tersendiri seperti di Amerika Serikat dengan nama USIA (*United State Information Agency*), Inggris dengan *Governmental Information and Communications Service* (GICS). Tetapi ada negara maju yang lain yang tidak mempunyai badan khusus tetapi tetap mempunyai sistem layanan

informasi publik yang dilaksanakan oleh badan/departemen di dalam negeri atau kantor perwakilannya diluar negeri seperti Australia, Jepang, China dan lainnya. Tentu masing-masing negara mempunyai karakter masing-masing sesuai iklim politik yang dianut tetapi semangatnya adalah bagaimana informasi bisa diakses secara mudah oleh publik serta datanya valid/berkualitas dan cepat/*realtime*.

Buku ini akhirnya ditutup dengan pembahasan mengenai Humas Pemerintah di era Demokrasi. Penulis sepertinya hendak mengingatkan betapa pentingnya peran kehumasan pada pemerintah. Karena bagaimanapun sebagai “corong” pemerintah, *spokesperson* akan menjadi penentu keberlanjutan kekuasaan politik penguasa negara itu. Bagaimana peran humas dalam mencitrakan peran pemerintah dimata publik atau bagaimana menyebarkan aktifitas atau kinerja lembaga-lembaga negara serta menangkap informasi dan aspirasi yang berkembang yang kemudian menjadi feed back bagi pengelola negara. Suatu pemerintahan sebenarnya sudah bekerja dengan cukup bagus, tetapi karena mengkomunikasikannya tidak bagus maka image yang berkembang di masyarakat bahwa pemerintah tidak ada prestasi yang membanggakan atau sebaliknya prestasinya biasa tetapi mereka mempunyai public figur; tokoh publik / pejabat atau tim PR yang handal maka kekurangan kekurangan disana-sini itu bisa “ditutup” dengan aksesntuasi pemberitaan presetasi di bidang tertentu yang memang unggul.

Menurut pandangan peresensi, buku ini unggul dalam hal wawasan tentang diskursus komunikasi politik, peran-peran media dan di kontekskan dengan iklim demokrasi yang ada. Tetapi masih ditemukan sedikit pengulangan bahasan di berbagai bab yang berbeda. Namun setidaknya kehadiran buku ini menambah khazanah dokumentasi ilmiah tentang bidang komunikasi politik karena belum banyak buku yang mengkontekskan komunikasi politik dengan media di era liberalisasi demokrasi seperti di Indonesia seperti saat ini. Pertanyaannya adalah di era demokrasi liberal seperti ini konsep Sokrates atau Plato tentang Politik apakah bergeser seperti halnya Machiavelli dalam bukunya *Il Principe* itu. Karena yang terjadi saat ini Penguasa (politik) sudah “berselingkuh” atau sebaliknya dengan Penguasa Media. Jika itu maka masyarakatlah nantinya yang akan menilai dan bersikap tentang tatanan model baru ini, bukan?

Surabaya, 16 Mei 2013

yusuf.amrozi@gmail.com